

**FONDASI EKONOMI ISLAM DAN DINAMIKA KEKUASAAN KERAJAAN
ISLAM AWAL (ABAD XIII–XVII): PENDEKATAN PENDIDIKAN SEJARAH
SAMUDERA PASAI, MALAKA, DAN ACEH DARUSSALAM**

Husnaini¹, Zulfikar^{2*}, Bobby Fahreza³, Muhammad Nur⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

³ SMP Negeri 1 Pante Bidari, Indonesia

⁴ PT. Pembangunan Aceh, Indonesia

Alamat e-mail : ¹ husnaini3818@gmail.com, ² zulfikar82@uinsuna.ac.id,

³ bobbyfahreza1610@gmail.com, ⁴ muhammad76nur@gmail.com,

ABSTRACT

This research is motivated by the strategic role of the Islamic kingdoms of the early 13th–17th centuries in shaping the foundations of the economy, power, and civilization of the Indonesian archipelago, which has not been fully studied through a historical education approach. This research aims to analyze the relationship between the foundations of Islamic economics and the dynamics of the ebb and flow of power of the Samudera Pasai, Malacca, and Aceh Darussalam Kingdoms and their relevance for the development of history learning. The method used is qualitative research with a descriptive-analytical character through a historical approach and history education, using secondary data sourced from historical chronicles, legal manuscripts, traveler's notes, as well as scientific literature and reputable journals. The research findings show that an Islamic economy based on international trade, port governance, currency, the Baitul Mal (the Islamic treasury), and religious legitimacy formed the primary basis for the formation and strengthening of the power of these three kingdoms. Samudera Pasai emerged as a pioneer of Islamic economics and education, Malacca as the center of maritime hegemony and Islamic law, while Aceh Darussalam developed as a political, economic, and intellectual power oriented toward colonial resistance. The research findings confirm that the decline of these kingdoms was influenced by internal conflict and global geopolitical pressures. The implications of this research enrich the historiography of Islam in the Indonesian archipelago while providing a practical contribution to history education through the development of contextual, critical teaching materials that are rich in economic values, power, and Islamic-national identity.

Keywords: Aceh Darussalam, Islamic Economics, Early Islamic Kingdom, Malacca, History Education.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis kerajaan Islam awal abad XIII–XVII dalam membentuk fondasi ekonomi, kekuasaan, dan peradaban Nusantara yang belum sepenuhnya dikaji melalui pendekatan pendidikan sejarah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara fondasi ekonomi Islam dan dinamika pasang surut kekuasaan Kerajaan Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam serta relevansinya bagi pengembangan pembelajaran sejarah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis melalui pendekatan historis dan pendidikan sejarah, menggunakan data sekunder yang bersumber dari kronik sejarah, naskah hukum, catatan musafir, serta literatur ilmiah dan jurnal bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam berbasis perdagangan internasional, tata kelola pelabuhan, mata uang, baitul mal, serta legitimasi keagamaan menjadi basis utama pembentukan dan penguatan kekuasaan ketiga kerajaan tersebut. Samudera Pasai tampil sebagai pelopor ekonomi dan pendidikan Islam, Malaka sebagai pusat hegemoni maritim dan hukum Islam, sedangkan Aceh Darussalam berkembang sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan intelektual yang berorientasi pada perlawanan kolonial. Temuan penelitian menegaskan bahwa kemunduran kerajaan-kerajaan tersebut dipengaruhi oleh konflik internal dan tekanan geopolitik global. Implikasi penelitian ini memperkaya historiografi Islam Nusantara sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pendidikan sejarah melalui pengembangan materi ajar yang kontekstual, kritis, dan sarat nilai ekonomi, kekuasaan, serta identitas Islam-bangsaan.

Kata Kunci: Aceh Darussalam, Ekonomi Islam, Kerajaan Islam Awal, Malaka, Pendidikan Sejarah.

A. Pendahuluan

Periode abad XIII–XVII Masehi merupakan fase penting dalam sejarah Nusantara yang ditandai oleh kemunculan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam awal sebagai kekuatan baru dalam lanskap sosial, politik, dan ekonomi Asia Tenggara. Pada masa ini, Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan religius, melainkan juga

menjadi landasan normatif yang membentuk tata kelola pemerintahan, jaringan perdagangan, serta hubungan diplomatik lintas kawasan. Intensitas perdagangan internasional yang melibatkan jalur Selat Malaka menjadikan wilayah Nusantara sebagai simpul strategis dalam konektivitas global antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok, sehingga kerajaan Islam awal

memiliki posisi sentral dalam proses transformasi peradaban pra-kolonial (Aizid, 2016).

Dalam konteks tersebut, Kerajaan Samudera Pasai menempati posisi historis yang sangat signifikan sebagai kerajaan Islam pertama yang diakui secara luas di Nusantara. Didirikan pada tahun 1267 oleh Meurah Silu yang kemudian bergelar Sultan Malik al-Saleh, Pasai berkembang pesat berkat letaknya yang strategis di pesisir utara Aceh dan kedekatannya dengan jalur perdagangan Selat Malaka. Aktivitas perdagangan rempah-rempah seperti lada dan kapur barus, penggunaan mata uang emas dirham, serta hubungan diplomatik dengan dunia Islam, khususnya Dinasti Mamluk Mesir, menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Pasai dibangun selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kondisi ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kekuatan ekonomi, legitimasi keagamaan, dan konsolidasi kekuasaan politik (Maghfirah, 2024).

Perkembangan model kerajaan Islam tersebut berlanjut dan mencapai skala yang lebih luas pada masa Kesultanan Malaka pada awal abad XV. Setelah Parameswara

memeluk Islam dan bergelar Sultan Iskandar Syah, Malaka menjelma menjadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam yang dominan di Asia Tenggara. Keberhasilan Malaka tidak terlepas dari sistem birokrasi pelabuhan yang tertata rapi melalui pembagian tugas para syahbandar, penerapan hukum berbasis syariat Islam dan adat, serta jaminan keamanan dan keadilan bagi pedagang asing (Fikri, 2011). Perkembangan ekonomi maritim ini turut mendorong bahasa Melayu menjadi lingua franca perdagangan, memperkuat identitas Islam-Melayu di kawasan Nusantara.

Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, Kesultanan Aceh Darussalam tampil sebagai kekuatan baru yang mewarisi sekaligus mengembangkan tradisi ekonomi dan politik Islam. Di bawah Sultan Ali Mughayat Syah dan mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh berhasil membangun hegemoni regional melalui penguasaan perdagangan lada, ekspansi wilayah, serta penguatan militer dan diplomasi internasional. Aceh menjalin hubungan langsung dengan Turki Usmani, Inggris, dan Belanda,

sekaligus mengelola keuangan negara melalui institusi baitul mal sebagai bentuk penerapan ekonomi Islam untuk kesejahteraan rakyat dan pengembangan pendidikan keislaman (Mildawati & Rama, 2024).

Secara teoretis, kajian ini berpijak pada pemahaman bahwa ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem kekuasaan dan pembentukan negara, bukan sekadar aktivitas material. Integrasi antara perdagangan, hukum Islam, institusi keagamaan, dan pendidikan menunjukkan bahwa kekuasaan kerajaan Islam awal dibangun melalui sinergi antara struktur ekonomi dan legitimasi ideologis (Sunarta et al., 2025). Namun demikian, dinamika kekuasaan ketiga kerajaan tersebut juga diwarnai oleh konflik internal, persaingan regional, serta tekanan eksternal berupa ekspansi militer dan kolonialisme Barat, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan kekuasaan mereka.

Meskipun kajian mengenai Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek politik atau kronologi sejarah semata. Pendekatan yang secara khusus

mengintegrasikan fondasi ekonomi Islam dengan dinamika kekuasaan serta dikontekstualisasikan dalam pendidikan sejarah masih relatif terbatas. Kesenjangan ini menyebabkan pemahaman tentang peran ekonomi Islam sebagai basis pembentukan kekuasaan dan identitas sosial kerajaan Islam awal belum sepenuhnya terartikulasikan dalam historiografi maupun bahan ajar sejarah (Niswah et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fondasi ekonomi Islam berperan dalam dinamika pasang surut kekuasaan Kerajaan Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam melalui pendekatan pendidikan sejarah. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi teoretis dalam pengayaan historiografi Islam Nusantara serta implikasi praktis bagi pengembangan pembelajaran sejarah yang kontekstual, kritis, dan bernilai edukatif. Dengan demikian, sejarah kerajaan Islam awal tidak hanya dipahami sebagai narasi masa lalu, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran strategis dalam membangun pemahaman tentang ekonomi, kekuasaan, dan identitas peradaban Islam di Nusantara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fondasi ekonomi Islam dan dinamika kekuasaan pada kerajaan Islam awal Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam pada abad XIII–XVII (Moleong, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan pendidikan sejarah, dengan menekankan analisis makna, konteks, dan relevansi peristiwa sejarah dalam pembentukan sistem ekonomi dan kekuasaan Islam, serta implikasinya bagi pembelajaran sejarah (F. D. Abdullah et al., 2024). Alat dan sumber penelitian berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber sejarah primer yang telah terdokumentasi (seperti kronik, catatan musafir, naskah hukum, dan arsip terjemahan), serta sumber sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Fadli, 2021). Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk menafsirkan fenomena sejarah secara komprehensif, tidak hanya

pada aspek kronologis, tetapi juga pada struktur ekonomi Islam, praktik kekuasaan, serta nilai-nilai yang melandasinya. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan kajian yang mengintegrasikan ekonomi Islam dan dinamika politik kerajaan Islam awal dalam kerangka pendidikan sejarah, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki implikasi akademik dalam pengayaan historiografi Islam Nusantara dan implikasi praktis sebagai rujukan pengembangan materi ajar sejarah yang kontekstual, kritis, dan bernilai edukatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fondasi Ekonomi Islam sebagai Basis Awal Kekuasaan Kerajaan Samudera Pasai (Abad XIII–XVI)

Kerajaan Samudera Pasai merupakan tonggak awal berdirinya kekuasaan Islam di Nusantara yang secara nyata memadukan kekuatan ekonomi dan legitimasi keagamaan. Berdirinya kerajaan ini pada tahun 1267 oleh Meurah Silu yang kemudian bergelar Sultan Malik al-Saleh menandai transformasi politik berbasis Islam yang berakar kuat pada aktivitas perdagangan

internasional. Letaknya yang strategis di pesisir utara Aceh dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka menjadikan Pasai sebagai simpul penting perdagangan global yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok (Niswah et al., 2025).

Fondasi ekonomi Islam Pasai tercermin dari pengelolaan perdagangan rempah-rempah seperti lada dan kapur barus yang dijalankan secara terorganisir dan terstandarisasi. Penggunaan mata uang emas dirham menjadi indikator kemajuan ekonomi dan integrasi Pasai dalam sistem perdagangan Islam internasional. Praktik ekonomi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi disertai legitimasi keagamaan melalui hubungan diplomatik dengan Dinasti Mamluk Mesir, yang memperkuat identitas Sunni dan mazhab Syafi'i sebagai dasar ideologis kerajaan (Maulidan et al., 2024).

Masa kejayaan Samudera Pasai juga ditandai dengan perannya sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Berdirinya pesantren dan madrasah, serta lahirnya karya sastra seperti Hikayat Raja Pasai, menunjukkan bahwa ekonomi, kekuasaan, dan pendidikan

berjalan secara simultan. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya diposisikan sebagai agama ritual, tetapi sebagai sistem nilai yang mengatur pemerintahan, perdagangan, dan pembentukan budaya intelektual masyarakat (Basri et al., 2024).

Namun demikian, dinamika kekuasaan Pasai mulai melemah akibat konflik internal dan tekanan eksternal (Fitriani et al., 2022). Persaingan elite kerajaan, dominasi Malaka sebagai pusat dagang baru, serta serangan Majapahit dan masuknya Portugis menyebabkan posisi Pasai semakin terdesak (Imawan, 2021). Ketidakmampuan melakukan adaptasi strategis terhadap perubahan geopolitik kawasan turut mempercepat kemundurannya (Sugiri, 2021).

Pada akhirnya, integrasi Samudera Pasai ke dalam Kesultanan Aceh pada tahun 1524 menandai berakhirnya peran Pasai sebagai kerajaan mandiri (Nasution & Ashani, 2025). Meskipun runtuh secara politik, warisan ekonomi Islam dan model pemerintahan Pasai tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan kerajaan Islam

berikutnya di Nusantara (Batubara, 2020).

Hegemoni Perdagangan dan Dinamika Kekuasaan Islam dalam Kesultanan Malaka (Abad XV–XVI)

Kesultanan Malaka muncul sebagai kekuatan Islam yang dominan di Asia Tenggara pada awal abad ke-15 dengan latar belakang migrasi politik Parameswara dari Palembang. Posisi geografis Malaka di Selat Malaka menjadikannya pusat transit utama perdagangan dunia. Konversi Parameswara menjadi Sultan Iskandar Syah memperkuat legitimasi Islam dan membuka ruang integrasi antara kekuasaan politik, ekonomi maritim, dan dakwah Islam (Maryamah et al., 2023).

Fondasi ekonomi Malaka dibangun melalui sistem pelabuhan yang sangat terorganisir, termasuk pembagian syahbandar berdasarkan asal pedagang (Maryamah et al., 2023). Sistem ini menjamin keamanan, keadilan, dan efisiensi perdagangan, sekaligus memperkuat kepercayaan pedagang internasional (Aizid, 2016). Undang-Undang Malaka yang mengintegrasikan syariat Islam dan adat Melayu menjadi instrumen hukum yang

menopang stabilitas sosial dan ekonomi kerajaan (Reid, 2011).

Pada masa Sultan Mansur Syah dan Sultan Mahmud Syah, Malaka mencapai puncak kejayaan sebagai pelabuhan kosmopolitan dan pusat penyebaran Islam (Fikri, 2011). Bahasa Melayu berkembang sebagai lingua franca perdagangan, memperluas pengaruh budaya Islam di kawasan Nusantara (Hakim, 2012). Malaka tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga pusat peradaban Islam yang membentuk identitas politik dan sosial masyarakat Melayu.

Namun, kejayaan tersebut mulai runtuh akibat konflik internal dan tekanan eksternal yang semakin intens. Perselisihan elite istana melemahkan pertahanan kerajaan, sehingga memudahkan Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511 (Madjid, 2014). Penaklukan ini menandai pergeseran besar dalam geopolitik Asia Tenggara dan awal kolonialisme Barat (M. A. Abdullah, 2020).

Meskipun jatuh, Malaka meninggalkan warisan penting berupa sistem hukum, tata kelola pelabuhan, dan model kerajaan Islam maritim (Miftakhuddin, 2020). Pengaruhnya tetap terasa dalam

kerajaan-kerajaan Islam Melayu berikutnya, termasuk Johor dan Aceh, yang mewarisi tradisi politik dan ekonomi Malaka.

Dinamika Ekonomi, Kekuasaan, dan Pendekatan Pendidikan Sejarah pada Kesultanan Aceh Darussalam (Abad XVI–XVII)

Kesultanan Aceh Darussalam lahir sebagai respons atas runtuhnya Malaka dan meningkatnya dominasi Portugis di Selat Malaka (Juliani, 2018). Di bawah Sultan Ali Mughayat Syah, Aceh berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dan membangun kekuatan politik berbasis militer dan ekonomi Islam. Letak strategis Aceh memungkinkan penguasaan perdagangan lada dan pengendalian jalur maritim penting (Anis et al., 2024).

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan ekspansi wilayah yang luas dan sistem ekonomi yang dikendalikan negara. Pengawasan ketat terhadap perdagangan lada, pengelolaan baitul mal, serta hubungan diplomatik dengan Turki Usmani dan negara Eropa mencerminkan kematangan ekonomi Islam Aceh. Aceh juga berkembang

sebagai pusat intelektual Islam dengan kehadiran ulama internasional (Fitriyah, n.d.).

Dalam perspektif pendidikan sejarah, Aceh memberikan contoh konkret bagaimana ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dan perlawanan terhadap kolonialisme (Usman, 2003). Sejarah Aceh tidak hanya merekam kejayaan politik, tetapi juga nilai perjuangan, jihad, dan kemandirian ekonomi yang relevan untuk pembelajaran sejarah kontekstual.

Kemunduran Aceh terjadi secara bertahap akibat konflik internal dan tekanan kolonial Belanda. Perang Aceh yang berkepanjangan melemahkan struktur sosial dan ekonomi kerajaan, meskipun perlawanan rakyat menunjukkan ketahanan ideologis dan religius yang kuat (Reid, 2011).

Pendekatan pendidikan sejarah terhadap Aceh Darussalam memungkinkan peserta didik memahami sejarah sebagai proses dinamis yang sarat nilai (Agustiniingsih, 2007). Aceh menjadi laboratorium historis untuk mengkaji hubungan antara ekonomi Islam, kekuasaan, dan identitas bangsa.

Tabel 1. Singkat Perbandingan
Kerajaan Islam Awal

Aspek	Samudera Pasai	Malaka	Aceh Darussalam
Basis Ekonomi	Perdagangan lada, dirham emas	Pelabuhan internasional	Lada, baitul mal
Puncak Kekuasaan	Abad XIII–XIV	Abad XV	Abad XVII
Faktor Runtuh	Konflik internal, Malaka	Portugis (1511)	Kolonialisme Belanda
Kontribusi Utama	Pelopori Islam Nusantara	Hegemoni maritim Islam	Perlawanan anti-kolonial

Kerajaan Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Islam merupakan elemen kunci dalam pembentukan dan keberlangsungan kekuasaan kerajaan Islam awal di Nusantara. Kejayaan dan kemunduran ketiganya dipengaruhi oleh kemampuan mengelola perdagangan, menjaga stabilitas politik, serta beradaptasi terhadap perubahan geopolitik global. Melalui pendekatan pendidikan sejarah, dinamika tersebut tidak hanya dipahami sebagai fakta masa lalu, tetapi sebagai sumber nilai, identitas, dan pembelajaran strategis bagi pengembangan historiografi Islam dan pendidikan sejarah Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fondasi ekonomi Islam memainkan peran sentral dalam pembentukan, penguatan, dan kemunduran kekuasaan kerajaan Islam awal di Nusantara pada abad XIII–XVII, khususnya di Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam. Ketiga kerajaan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara aktivitas perdagangan, legitimasi keagamaan, dan tata kelola kekuasaan menjadi faktor utama lahirnya hegemoni politik dan peradaban Islam maritim, dengan ciri khas pengelolaan ekonomi yang berlandaskan nilai syariat, jaringan perdagangan internasional, serta dukungan institusi pendidikan dan hukum Islam. Dinamika pasang surut kekuasaan tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan geopolitik, stabilitas internal, dan tekanan kolonial. Dalam perspektif pendidikan sejarah, kajian ini menegaskan bahwa sejarah kerajaan Islam awal bukan sekadar narasi kronologis, melainkan sumber pembelajaran kontekstual yang memuat nilai kemandirian ekonomi,

legitimasi moral, ketahanan ideologis, dan identitas keislaman-bangsaan, sehingga relevan untuk memperkaya pemahaman peserta didik terhadap hubungan erat antara ekonomi Islam, kekuasaan, dan pembentukan peradaban Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., Sulistiyo, B., & Saepudin, D. (2024). Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2(2), 77.
- Abdullah, M. A. (2020). *Dinamika Islam Kultural*. IRCiSoD.
- Agustiningsih, N. (2007). *Konflik Ulama-Uleebalang 1903-1946 Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial Di Aceh*.
- Aizid, R. (2016). *Sejarah Islam Nusantara: Dari Analisis Historis Hingga Arkeologis Tentang Penyebaran Islam Di Nusantara*. Diva Press.
- Anis, M., Ibrahim, H., Riyani, M., & Rahman, A. (2024). Menelusuri Jejak Sejarah Dan Warisan Kultural Kenegerian Lada: Pergulatan Perdagangan Rempah Di Pesisir Timur Aceh. *AMERTA*, 42(2), 137–152. <https://doi.org/10.55981/amt.2024.5515>
- Basri, M., Siregar, N., & Nasution, D. A. P. S. (2024). Pengaruh Kerajaan-Kerajaan Islam Terhadap Perkembangan Bahasa Dan Sastra Di Sumatera. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Batubara, T. (2020). Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahhar: Sang Penakluk Dari Kesultanan Aceh Darussalam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(1), 1–6.
- Desy Arum Sunarta, Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam : Sebuah Kajian Teoretis dan Filosofis Paradigms and Characteristics of the Islamic Economic System : A Theoretical and. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 44–75.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami

- | | |
|--|--|
| <p>Desain Metode Penelitian
 Kualitatif. <i>Jurnal Humanika</i>,
 21(1), 33–54.
 https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.</p> <p>Fikri, R. R. (2011). <i>Dinamika Perdagangan Bandar Malaka Dari Pemerintahan Sultan Mansyur Syah Hingga Masa Pemerintah Portugis (1456-1641)</i>. Universitas Indonesia.</p> <p>Fitriani, A., Siregar, I., & Ramli, S. (2022). Peran Sultan Malikussaleh Dalam Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai 1297-1326 M. <i>JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah</i>, 2(1), 11–22.</p> <p>Fitriyah, L. (n.d.). <i>Perang Aceh 1873-1903 (Surutnya Hubungan Diplomasi Kesultanan Aceh Dan Turki Utsmani)</i>.</p> <p>Hakim, L. (2012). <i>Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam</i>. Erlangga.</p> <p>Imawan, D. H. (2021). <i>The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia</i>. Diva Press.</p> <p>Juliani, R. (2018). Menarik Benang Merah Hubungan Aceh Dengan Sulawesi Selatan. <i>SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi</i>, 3(1).</p> | <p>https://doi.org/10.35308/sumber.v3i1.633</p> <p>Madjid, M. D. (2014). <i>Catatan Pinggir Sejarah Aceh: Perdagangan, Diplomasi, Dan Perjuangan Rakyat</i>. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.</p> <p>Maghfirah, M. (2024). Relasi Kuasa Dan Islamisasi: Dinamika Hukum Islam Di Kesultanan Samudera Pasai. <i>PERADA</i>, 7(1).
 https://doi.org/10.35961/perada.v7i1.1506</p> <p>Maryamah, Yuningsi, P., Mawarni, D., & Romadona, P. (2023). Sejarah Kerajaan Malaka Dan Keberhasilannya Dalam Menyebarkan Agama Islam. <i>Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah</i>, 9(2), 93–100.
 https://doi.org/10.31851/kalp.v9i2.14544</p> <p>Maulidan, A. C., Rhamadan, F. S., Rahma, D., Indonesia, U. P., Sufyan, A., Saw, M., & Dia, M. (2024). Sejarah Peradaban Bani Umayyah dan Pengaruhnya Terhadap Penyebaran Islam di Nusantara Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan sejarah Dinasti Bani Umayyah , dimulai dengan masa Syam</p> |
|--|--|

- dituturkan dalam banyak hadits SWT , Syria memang memiliki peson. *Jurnal Artefak*, 11(September), 159–180.
- Miftakhuddin. (2020). *Kolonialisme: Eksploitasi Dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7ms6v>
- Mildawati, T., & Rama, B. (2024). Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Awal Hingga Munculnya Kerajaan Islam Di Aceh (Lembaga Pendidikan Islam Dan Tokohnya). *Vifada Journal of Education*, 2(1), 1–27. <https://doi.org/10.70184/cj62pb29>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R., & Ashani, S. (2025). Tinjauan Sistem Politik Kerajaan Samudera Pasai: Dinamika Dan Warisan Sejarahnya. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 3(1), 1–15.
- Niswah, C., Maharani, F., Amallia, N., Adison, F. A. D., & Andini, T. (2025). Pendidikan Islam Di Indonesia Ada Masa Awal: Sebuah Perjalanan Sejarah. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 5(2), 158–168.
- Reid, A. (2011). *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia Dan Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiri, A. (2021). *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Abad VII Sampai Abad XV*. Penerbit A-Empat.
- Usman, A. R. (2003). *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.